

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Setiap usaha, baik barang maupun jasa, pada dasarnya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pendidikan sebagai suatu usaha jasa disamping memiliki peluang yang besar, juga dihadapkan pada ancaman persaingan yang tidak kalah besarnya. Kemampuan penyedia jasa pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman persaingan yang semakin sengit apalagi pendidikan adalah salah satu faktor yang menunjang perkembangan kualitas sumber daya negara suatu negara.

Dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (melek huruf, usia harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup), pada tahun 2005, Indonesia menempati urutan 110 dari 177 negara dengan indeks 0.697, turun dari posisi sebelumnya di urutan 102 dengan indeks 0.677 pada tahun 1999 (**Prof. Dr. Ir. H. Sjafri Mangkuprawira, 2008**). Posisi ini cukup jauh dibandingkan negara-negara tetangganya, seperti Malaysia (urutan 61/0.796), Thailand (urutan 73/0.778), Filipina (urutan 84/0.758) dan Vietnam (urutan 108/0.704). Pada tahun 2006 Indonesia mengalami kemajuan dengan angka IPM mencapai 0.711 dan berada di urutan 108, mengalahkan Vietnam yang mempunyai nilai 0.709. Kecenderungan dari angka IPM Indonesia adalah terus menerus naik (0.677 pada 1999, 0.697 pada 2005, dan 0.711 pada 2006) dan semakin mempersempit ketinggalanya dibanding negara-negara lain. Batasan untuk klasifikasi negara maju adalah nilai IPM diatas 0.800. Pada tahun 2007 angka IPM indonesia kembali naik menjadi 0.728. Laporan yang dikeluarkan oleh UNDP pada 27 November 2007, Indonesia berada pada peringkat 108. Oleh sebab itulah pembaharuan pendidikan di Indonesia harus terus dilakukan. Penataan pendidikan yang berkualitas dan terus menerus yang adaptif terhadap perubahan jaman perlu terus diupayakan diantaranya melalui peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi tenaga pendidik; penetapan biaya pendidikan akademis yang terjangkau; serta perbaikan kurikulum dan pengajaran bahasa asing di sekolah.

Mewujudkan pendidikan yang berkualitas tidak dapat dipisahkan dari peran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Mereka memiliki peran yang sangat penting dan strategis, dan karena itulah, menurut Davies dan Ellison (1992), guru merupakan pemeran utama di dalam kelas. Sebutan pemeran utama bagi tenaga pendidik memang sangat beralasan mengingat perannya yang tidak dapat tergantikan oleh apapun (Levine, 1992). Upaya yang dilakukan untuk mendukung terlaksananya proses belajar mengajar yang baik dan kondusif adalah dengan cara menyediakan guru yang berkualitas dan profesional, fasilitas pendidikan yang memadai serta pola mengajar yang menarik.

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya dari sisi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Disamping itu juga lahirnya Undang-Undang tentang Guru dan Dosen juga dilandasi oleh keinginan untuk memperjelas kedudukan dan fungsi tenaga pendidik, mempertegas prinsip profesionalisme, mempertegas kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi dan hal-hal lain yang terkait dengan hak dan kewajiban tenaga pendidik termasuk pengangkatan dan perlindungan tenaga pendidik (Baedhowi, 2007).

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 mengamanatkan, bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip antara lain memiliki kualifikasi akademik, latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan bidang tugas tersebut. Pada pasal 9 dinyatakan bahwa kualifikasi sebagaimana dimaksud diperoleh melalui pendidikan tinggi jenjang S1 atau D4. Kualifikasi akademik guru merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diambalnya.

Dalam data Educational Statistics in Brief in Indonesia, Ministry of National Education (2005) dijelaskan bahwa jumlah guru dan dosen sekolah negeri dan swasta menurut ijazah tertinggi pada tahun ajaran 2003/2004 adalah 2,610,686 orang dengan rincian ijazah tertinggi yaitu: Program Khusus TK 443 (0,01%), SLTP 12,023 (0,44%), Sekolah Menengah 624, 043 (22,80%), Sekolah Menengah Atas 238,034 (9,11%), Diploma 863,018 (32,04%), Sarjana Muda 133,626 (5,10%), Sarjana 770,920 (28,53%), Magister 83,676

(3,21%), Doktor 13,799 (0,53%), dan Ijazah lainnya untuk SLB 595 (0,03%) (Buletin BNSP Vol. I/No. 3/September 2006).

Globalisasi pendidikan menuntut mengamanatkan bahwa pendidikan harus dikembangkan dan dikelola secara profesional universal. Ini berarti bahwa setiap golongan masyarakat dalam sebuah negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah hak setiap anak (Sadig Rasheed, 2000). Sementara di kenyataannya di Indonesia biaya pendidikan masih tergolong mahal (Nakoela Soenarta, 2004). Banyak golongan masyarakat di Indonesia yang belum merasakan pendidikan. Jika dilihat dari pendapatan keluarga, jumlah anak bersekolah dari keluarga terpaut jauh. Penduduk dengan pendapatan terendah yang jumlahnya 20 persen dari seluruh penduduk memiliki APM yang jauh lebih rendah (49,9 persen) dibandingkan dengan 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi (72,2 persen) (United Nations Children's Fund – UNICEF). APM adalah jumlah anak kelompok usia tertentu yang duduk di bangku sekolah dibandingkan dengan jumlah seluruh anak dalam kelompok usia tersebut. Untuk pendidikan di sekolah dasar, kelompok usia anak-anaknya adalah 7-12 tahun, sedangkan untuk pendidikan di sekolah lanjutan pertama, kelompok usianya 13-15 tahun.

Dari data di fakta di atas kita bisa menyimpulkan bahwa saat ini pendidikan hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat yang mampu saja di Indonesia. Peran serta masyarakat dalam membantu meringankan beban pendidikan di Indonesia sangat diharapkan seperti yang tertuang dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 54 bahwa Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

Demo seputar permasalahan pendidikan yang terjadi baik di Jakarta sebagai pusat pemerintahan atau di daerah menunjukkan adanya pihak-pihak yang tidak puas terhadap fasilitas pendidikan yang ada di Indonesia. Permasalahan yang terjadi biasanya seputar biaya pendidikan yang tinggi. Sudah rahasia umum jika pendidikan sekarang sangat mahal. Seperti kata buku, orang miskin dilarang sekolah! Memprihatinkan, tapi itulah kenyataannya. Padahal pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Malaysia, Jerman, bahkan Kuba sekalipun bisa membuat pendidikannya sangat murah dan dapat diakses oleh sebagian besar lapisan masyarakatnya

(pendidikanindonesia.blogspot.com). Program Wajib Belajar Sembilan tahun seharusnya menjadi PR besar bagi negara. Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah pinggiran yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Dengan terbengkalainya program wajib belajar sembilan tahun mengakibatkan anak-anak Indonesia masih banyak yang putus sekolah sebelum mereka menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Dengan kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, sulit bagi bangsa ini keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada kompetisi di era global.

Miris sekali. Padahal jumlah sekolah yang tersedia banyak sekali. Di DKI Jakarta (tidak termasuk kepulauan seribu) jumlah sekolah untuk jenjang SD sebanyak 4055, SMP sebanyak 1727 dan SMU/K sebanyak 1881 (ksi.plasa.com). Diantara sejumlah banyak sekolah yang tersebar di Jakarta, angka anak putus sekolah di Jakarta cenderung mengalami kenaikan. Data Dinas Pendidikan DKI Jakarta tahun 2008, jumlah anak putus sekolah di tingkat SMA mencapai 1.253 orang (0,71 persen). Jumlah anak putus sekolah di tingkat SMK mencapai 3.188 orang (1.61 persen). Total pelajar tingkat menengah atas di Ibu Kota adalah 377.198 orang. Jumlah anak putus sekolah tingkat SMA meningkat sekitar 0,04 persen dibandingkan data tahun 2007 sebesar 1.229 orang (0,67 persen). Anak putus sekolah di tingkat pendidikan dasar di Jakarta tahun 2008 sebanyak 571 (0,06 persen), dan pendidikan menengah 1.947 (0,54 persen). Total pelajar SD-SMP di Jakarta tahun 2008 adalah 1.226.069. Sedangkan data tahun 2007 menunjukkan, anak putus sekolah di tingkat pendidikan dasar di Jakarta 914 orang (0,11 persen), SMP 2.172 orang (0,63 persen). Total pelajar SD-SMP di Jakarta tahun 2007 adalah 1.190.807. Kebanyakan alasan anak putus sekolah adalah lebih memilih bekerja untuk membantu keuangan keluarga (metro.vivanews.com, 2009).

Tabel 1.1 : Jumlah Sekolah di Jakarta

	Playgroup	Taman Kanak-Kanak	SD	SMP	SMU/K	PT	UMUM	Total
Jakarta Barat	3	375	603	378	426	374	34	2193
Jakarta Pusat	2	366	659	285	337	562	89	2300
Jakarta Selatan	4	611	1050	392	481	753	93	3384
Jakarta Timur	2	756	1343	454	437	445	53	3490

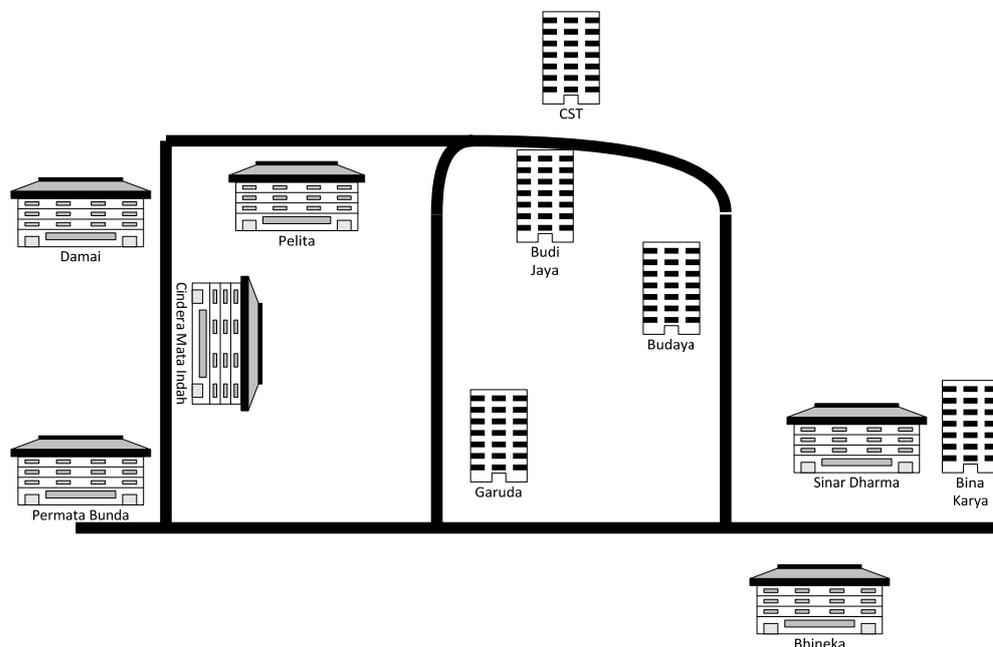
Jakarta Utara	0	242	400	218	200	78	17	1155
Total	11	2350	4055	1727	1881	2212	286	12522

Sekolah Budaya didirikan pada tahun 1979 oleh Mrs Sri Lanawati, berlokasi di daerah Jembatan Lima, Jakarta Barat. Di daerah Jembatan Lima terdapat cukup banyak bisnis konveksi dan ditinggali oleh para pendatang yang berasal dari pulau Kalimantan dan notabene adalah etnis Tionghoa. Pada awal berdirinya, Budaya dikelola dengan orientasi non-profit. Namun kesibukan pemilik pada tahun 2005, kepemilikan sekolah ini berpindah tangan pada sebuah Gereja Kristen yang berlokasi di daerah yang sama. Sejak saat itu dibentuk sebuah Badan Pengurus Sekolah (BPS) yang bertugas untuk menjalankan operasional sekolah yang mengelola dana secara swadaya ini. Sekolah ini dibentuk dengan visi “Tercapainya pengembangan anak didik seutuhnya secara intelektual, emosional maupun spiritual”, serta misi “Menumbuhkan dan meningkatkan mutu : Sumber Daya Manusia, Manajemen, Rasa Kebangsaan, dan Keimanan”. Dari visi dan misi ini, Budaya memegang moto “Mendidik, Cerdas dan Bermartabat” dalam setiap kegiatannya. Sampai saat ini sekolah Budaya dikenal dengan prestasi akademisnya. Pada akhir tahun 1980-an hingga awal tahun 2000-an, Sekolah Budaya dikenal dengan prestasinya di bidang bahasa Inggris dan komputer. Hal ini ditandai dengan seringnya memenangi berbagai ajang perlombaan yang diikuti dan prestasi lainnya yang tidak tercatat. Dari jenis-jenis aktivitas yang seperti ini yang membuat para orang tua bangga dengan anak-anaknya. Lewat aktivitas seperti ini pula Sekolah Budaya disegani oleh Sekolah-sekolah sekitar. Prestasi semacam ini bisa dicapai karena ada beberapa guru yang menerapkan cara mengajar yang berbeda dari guru-guru yang lainnya dan ditunjang dengan kegiatan di luar kegiatan belajar mengajar.

Kebanyakan siswanya berasal dari etnis Tionghoa. Kerusuhan tahun 1998 memaksa sejumlah orang tua kembali ke kampung halamannya. Siswa yang bersekolah di Budaya terpaksa mengikuti orang tua yang kembali ke daerah dan hal ini mempengaruhi jumlah siswa yang bersekolah di Budaya. Sejak kerusuhan 1998, jumlah siswa terus menurun. Setelah kondisi politik di Indonesia pulih, *issue* lain yang lahir adalah jam SMP Budaya siang hari dan beberapa orang tua merasa keberatan dengan pola belajar seperti ini. Tren penurunan jumlah siswa sangat terasa sekali pada jenjang SMP. Persaingan dengan sekolah sekitar pun tidak kalah sengit. Sekolah Budaya diapit oleh beberapa sekolah yang memiliki fasilitas gedung yang lebih baik. Kelebihan Sekolah Budaya adalah biaya pendidikan (uang

sekolah) Sekolah Budaya paling murah diantara sekolah sekitar. Namun hal ini tidak serta merta mempengaruhi pertimbangan orang tua untuk memilih Sekolah Budaya untuk menjadi sekolah pilihan bagi anak mereka. Sekolah-sekolah tersebut antara lain:

- CST
- Bhineka
- Garuda
- Budi Jaya
- Pelita
- Widuri / Permata Bunda
- Damai
- Cinderata Mata Indah



Gambar 1.1 : Lokasi Sekolah-sekolah di Sekitar Sekolah Budaya

Issue mengenai SMP Budaya yang belajar di siang hari ternyata lebih berperan besar daripada biaya pendidikan yang murah di Sekolah Budaya. Sekolah Budaya harus memiliki sesuatu yang lebih yang dapat mengalahkan *issue* tersebut. *Image* bahwa sekolah dengan biaya yang murah namun kurang berkualitas harus dikikis oleh Sekolah Budaya. Sekolah Budaya harus melakukan sesuatu (inovasi) untuk mengalahkan *issue* tersebut. Sekolah lainnya mungkin mengalami hal lain yang mempengaruhi turunnya jumlah siswa, seperti gengsi orang tua yang lebih menyekolahkan anaknya di sekolah yang lebih bonafit, sekolah

lain yang memiliki lebih banyak kegiatan ekstrakurikuler, dan siswa yang lebih memilih sekolah yang pamor lebih baik.

Table 1.2 : Jumlah siswa SMP Budaya Tahun Ajaran 2005/2006 – 2009/2010

Kelas	Tahun Ajaran				
	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010
SMP I	35	31	33	34	17
SMP II	50	35	31	32	36
SMP III	37	48	31	29	30

Saat ini IT berperan penting hampir di setiap aktivitas manusia. *Information Technology* mampu menyediakan fasilitas yang dapat mempermudah kehidupan manusia hampir di semua sisi kehidupan manusia termasuk di dalamnya dunia pendidikan. Menurut Rosenberg (2001), dengan berkembangnya penggunaan IT ada lima pergeseran dalam proses pembelajaran yaitu: (1) dari pelatihan ke penampilan, (2) dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja, (3) dari kertas ke “*online*” atau saluran, (4) fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, (5) dari waktu siklus ke waktu nyata. Komunikasi sebagai media pendidikan dilakukan dengan menggunakan media-media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, *e-mail*, dan sebagainya. Interaksi antara guru dan siswa tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka tetapi juga dilakukan dengan menggunakan media-media tersebut (Rosenberg, 2001). Inovasi dengan melibatkan IT dalam proses belajar mengajar diharapkan dapat melahirkan *image* baru bahwa sekolah kecil tidak identik dengan sesuatu yang kecil.

Untuk membantu mewujudkan tujuan pemerintah dan sekolah-sekolah lain yang mengalami permasalahan yang sama dengan Sekolah Budaya dalam menyediakan pendidikan yang murah kepada masyarakat maka penelitian ini dilakukan. Jika sekolah-sekolah kecil semacam ini menjamur maka dapat pilihan masyarakat akan sekolah murah makin banyak sehingga semakin banyak lagi masyarakat golongan ekonomi ke bawah yang dapat menikmati pendidikan.

II. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah :

- Kemampuan bersaing sekolah kecil yang kurang dengan sekolah-sekolah besar sehingga kurang dapat menjaring lebih banyak siswa.
- *Image* biaya pendidikan yang murah sama dengan kualitas pendidikan yang jelek dan layanan pendidikan yang kurang memadai.
- *Issue* intake yang mempengaruhi pertimbangan orang tua dalam memilihkan sekolah untuk anaknya.
- Siswa jenuh dengan pola belajar yang monoton

III. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mencari solusi inovasi pendidikan yang dapat membantu sekolah-sekolah kecil dalam usaha *image rebranding* sehingga sekolah-sekolah kecil dapat bersaing dengan sekolah-sekolah besar lainnya dengan biaya yang murah.
2. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan dunia pendidikan dengan pemanfaatan ICT.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi dunia pendidikan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan khususnya bagi para pengambil keputusan dalam mengembangkan jasa pendidikan sebagai solusi inovasi dalam layanan pendidikan.

2. Bagi dunia akademis

Sebagai sumbangan pemikiran, khususnya bagi bidang ilmu Magister Manajemen Sistem Informasi.

3. Bagi penulis

Secara umum, penelitian ini menambah wawasan penulis mengenai peran *Information System* dalam membantu sebuah institusi keluar dari permasalahannya. Secara khusus, penelitian ini menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi di Sekolah Budaya dan membantu mencari solusi terutama dari sisi *information system*.

IV. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan dilakukan pada penelitian ini terbatas pada hal-hal yang yang menyebabkan turunnya jumlah siswa di sekolah-sekolah kecil dan solusi berupa solusi inovasi pada layanan pendidikan.

Inovasi yang disarankan adalah pelibatan *Information and Communication Technology* dalam proses belajar dan mengajar. Nantinya solusi ini diharapkan dapat menjadi sebuah competitive advantage untuk sekolah-sekolah dibandingkan dengan sekolah-sekolah pesaing di daerah sekitar. *Information and Communication Technology* nantinya akan berperan dalam usaha *rebranding* lewat pembelajaran berbasis multimedia. Tenaga pendidik pun akan mendapatkan fasilitas berupa bank soal. Siswa pun dapat dilatih untuk mencari bahan ajar lewat media internet sehingga wawasan siswa tidak hanya terpaku pada buku. Dengan ini wawasan siswa dapat lebih berkembang. Lewat fasilitas-fasilitas ini, tenaga pendidik dapat meningkatkan kualitas pengajarannya sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas pula. Jika hal ini dapat diwujudkan bukan tidak mungkin jumlah penerimaan siswa di Sekolah Budaya dan sekolah-sekolah lain akan meningkat secara signifikan .